

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH DALAM
PENGENDALIAN INFLASI DI KOTA SERANG**

***EFFECTIVENESS OF REGIONAL FISCAL POLICY FOR
INFLATION CONTROL IN SERANG CITY***

(disubmit 25 Februari 2019, direvisi 15 Mei 2019, diterima 30 Juni 2019)

Reza Septian Pradana¹

¹Fungsional Statistisi Ahli BPS Kabupaten Aceh Jaya
Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km 152, Keutapang, Calang, Aceh Jaya
Corresponding Author: reza.sp@bps.go.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal daerah yang ditinjau berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang secara signifikan berpengaruh positif terhadap inflasi sedangkan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Serang dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja pegawai dan belanja barang serta penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: belanja barang, belanja pegawai, inflasi, kebijakan fiskal daerah, penerimaan pajak daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of regional fiscal policy based on personnel expenditure, goods expenditure, and local taxes revenue to control inflation in Serang City. This study uses multiple regression analysis. The result of estimation shows that personnel expenditure and goods expenditure significantly give positive influence to inflation while local taxes revenue significantly give negative influence to inflation. So, The Control of Inflation in Serang City can be done by controlling of local government expenditure especially personnel expenditure and goods expenditure and local government revenue.

Keyword: goods expenditure, inflation, local fiscal policy, local taxes revenue, personnel expenditure

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting dan telah

banyak mendapat perhatian para ahli ekonomi. Setiap kali ada gejolak sosial, politik, dan ekonomi di dalam maupun di

luar negeri, masyarakat selalu mengaitkan dengan masalah inflasi (Mankiw, 2006). Laju perubahannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan masalah makroekonomi yang nantinya memberikan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Menurut Boediono (1995), inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan kecenderungan naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Kenaikan tingkat harga ini mengakibatkan daya beli dari masyarakat akan menurun. Kemudian, barang-barang hasil produksi tidak akan habis terjual dan produsen pun tidak akan menambah besaran investasinya. Besaran investasi yang berkurang akan mengakibatkan pendapatan nasional akan menurun yang pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan kegiatan suatu perekonomian yang merupakan roda pembangunan.

Inflasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional namun hingga ke tingkat regional. Salah satunya terjadi di Kota Serang yang terletak di Provinsi Banten. Pada akhir tahun 2016, tingkat harga secara umum di Kota Serang yang diproksi dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 133,02. Angka ini membawa Kota Serang sebagai kota yang memiliki tingkat harga secara umum tertinggi kedua dari tiga kota inflasi di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang dengan IHK sebesar 133,61. Inflasi bulanan Kota Serang posisi Desember tahun 2016 sebesar 0,12 persen. Angka ini pun menjadikan Kota Serang menjadi kota dengan tingkat inflasi terkecil di Provinsi Banten apabila dibandingkan dengan kota

inflasi lainnya di Provinsi Banten dimana inflasi Kota Tangerang mencapai 0,66 persen dan Kota Cilegon mencapai 0,94 persen. Inflasi tahunan Kota Serang posisi Desember 2016 mencapai 3,26 persen dan tertinggi kedua setelah Kota Cilegon yang mencapai 4,22 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi Kota Serang cukup terkendali apabila dibandingkan dua kota inflasi lainnya di Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kota Cilegon). Namun demikian, pengendalian terhadap inflasi di Kota Serang tetap harus dilakukan agar tetap terjaga dalam taraf ringan.

Menurut Rahardja, Manurung (2008) dalam Masri (2010); Mankiw (2007); Nanga (2001); Nopirin (2000), kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang dimaksudkan dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Kebijakan fiskal sering juga didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran yang mencakup semua level pemerintahan (Govil, 2009).

Dalam penerapannya, kebijakan fiskal ini memiliki dua instrumen utama yaitu belanja pemerintah dan penerimaan pajak. Belanja pemerintah yang dicakup dalam penelitian ini yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau

barang, kepada pegawai pemerintah, pensiunan, anggota TNI/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara baik yang bertugas di dalam negeri maupun diluar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja barang adalah belanja pemerintah untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari.

Kenaikan belanja pemerintah khususnya belanja pegawai dan belanja barang akan meningkatkan permintaan agregat. Kenaikan belanja pegawai akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga konsumsi masyarakat meningkat sedangkan kenaikan belanja barang akan langsung meningkatkan komponen belanja pemerintah. Dalam jangka pendek, peningkatan kedua jenis belanja ini akan menyebabkan peningkatan jumlah output. Tingkat harga pun mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi akibat permintaan barang dan jasa yang melebihi penawarannya ini disebut sebagai inflasi akibat tarikan permintaan (*demand pull inflation*).

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Ini juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang bersifat

konsumtif. Pada akhirnya, ini dapat menurunkan harga-harga.

Idealnya, kebijakan fiskal berfungsi sebagai stabilisator otomatis (*automatic stabilizer*) dalam perekonomian yang mensyaratkan sifat *countercyclical* yaitu kebijakan fiskal pro aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, seperti *booming* atau resesi. Beberapa penelitian menunjukkan belum adanya sifat *countercyclical* pada kebijakan fiskal di Indonesia (Akitoby, et.al. 2004, Baldacci, 2009 dalam Surjaningsih). *Countercyclical* sendiri dimaknai sebagai kebijakan fiskal yang berlawanan dengan keadaan ekonomi yang sedang berlaku. Misalnya, pemerintah mengambil kebijakan yang bersifat ekspansif pada saat perekonomian sedang mengalami resesi dan sebaliknya. Namun, hasil riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2009) yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia cenderung bersifat *acyclical* secara agregat atau justru *procyclical* apabila didasarkan pada pengelompokan belanja. Misalnya saja, sejalan dengan teori Keynesian mengenai inflasi, kenaikan belanja pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai setiap tahunnya ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat saat terjadi inflasi. Namun, di sisi lain kenaikan belanja gaji ini malah berpotensi meningkatkan inflasi. Jadi, jelas bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang kurang hati-hati (*prudent*) dan mengabaikan perannya sebagai stabilisator otomatis berpotensi menyebabkan inflasi.

Masri (2010) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001-2008)” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan fiskal

terhadap inflasi. Penelitiannya memfokuskan pada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap inflasi regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Variabel yang digunakan yaitu belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan dummy reformasi desentralisasi fiskal sebagai variabel bebas serta inflasi sebagai variabel dependen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan dummy reformasi desentralisasi fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap inflasi. Masri (2010) menyarankan agar belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi karena dapat meningkatkan output barang dan jasa sehingga dapat menjaga stabilitas harga. Sedangkan belanja pegawai dan belanja operasional digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan dan program pemerintah.

Selain itu, Pratama (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Penerimaan Pajak Terhadap Inflasi di Indonesia Berdasarkan Pendekatan *Vector Auto Regression (VAR)* Periode 1970-2011” juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi. Variabel yang digunakan yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak sebagai variabel bebas serta penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap inflasi. Hasil tersebut membuktikan keberlakuan model keynesian di Indonesia. Pratama (2013) menyarankan agar implementasi

kebijakan fiskal selanjutnya dilakukan lebih hati-hati.

Berdasarkan pemikiran diatas, diperlukan suatu analisis untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Dengan demikian, diperoleh informasi terkait upaya yang dapat dilakukan agar inflasi di Kota Serang dapat terkendali.

Ada tiga hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, belanja pegawai berpengaruh positif terhadap inflasi di Kota Serang. Kedua, belanja barang berpengaruh positif terhadap inflasi di Kota Serang. Ketiga, penerimaan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap inflasi di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membentuk model yang dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu inflasi sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Margaretha (2013) melakukan transformasi ke dalam bentuk linier dengan menggunakan logaritma natural (ln) guna menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$INF_t = \alpha + \beta_1 \ln BP_t + \beta_2 \ln BB_t + \beta_3 \ln PP_t + e_t$$

dimana:

- INF_t = Inflasi periode t (persen) (di *proxy* dengan nilai logaritma natural dari Indeks Harga Konsumen (IHK))
 α = Intersep
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen
 $\ln BP_t$ = Pertumbuhan Belanja Pegawai periode t (persen)
 $\ln BB_t$ = Pertumbuhan Belanja Barang periode t (persen)
 $\ln PP_t$ = Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah periode t (persen)
 e_t = *error term* periode t
 t = tahun 2010, 2011, ..., 2016

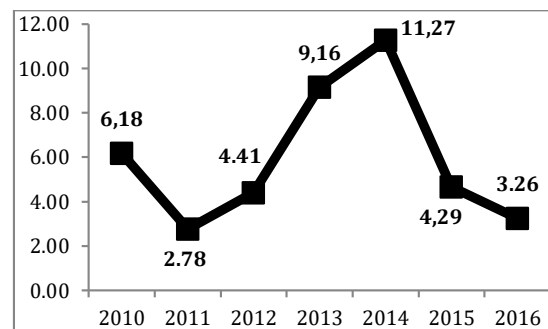
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkembangan Inflasi, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang Tahun 2010-2016

Pada umumnya, masyarakat menginginkan biaya kebutuhan hidup yang stabil serta pendapatan yang meningkat dari waktu ke waktu atau secara makro terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai stabilitas ekonomi yang mantap. Dengan demikian, stabilitas ekonomi diperlukan untuk menjaga pendapatan masyarakat agar tidak tergerus oleh kenaikan harga (inflasi) sehingga masyarakat akan menjadi lebih makmur (Boediono, 2010 dalam Saputra, 2013).

Tingkat inflasi tahunan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan desember tahun

berjalan dibagi IHK bulan desember tahun sebelumnya. Berdasarkan gambar 1, diperoleh informasi bahwa selama tahun 2010 hingga 2016 perkembangan inflasi di Kota Serang cenderung berfluktuatif dan masih dalam taraf ringan kecuali tahun 2014. Inflasi menunjukkan penurunan pada tahun 2011 namun meningkat kembali pada tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2015, inflasi kembali menurun hingga tahun 2016. Pada tahun 2013, inflasi tahunan di Kota Serang sangat tinggi dan mendekati dua digit yakni sebesar 9,16 persen. Pada tahun 2014, inflasi tahunan Kota Serang mencapai taraf sedang yakni mencapai 11,27 persen. Salah satu penyebab tingginya inflasi tahunan di kedua tahun ini adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Nilai positif pada angka tingkat inflasi tahunan Kota Serang menunjukkan bahwa selama tahun 2010 hingga 2016 telah terjadi kenaikan tingkat harga secara umum di Kota Serang.



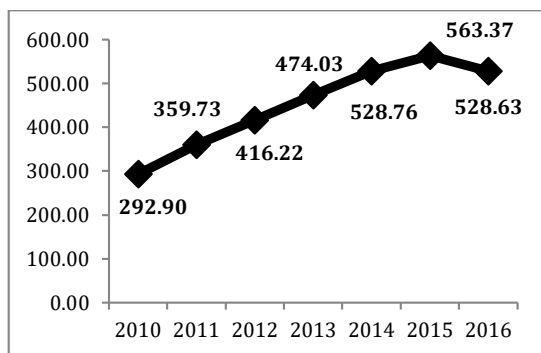
Sumber: BPS, diolah

Gambar 1 Perkembangan Inflasi Kota Serang Tahun 2010-2016 (persen)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap terjaga dalam taraf ringan yaitu implementasi kebijakan fiskal daerah secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian

terhadap pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

Gambar 2 memperlihatkan belanja pegawai berupa gaji cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya pada periode 2010-2015 namun mengalami penurunan sebesar 6,17 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2010, belanja pegawai pemerintah mencapai 292,90 milyar rupiah. Kemudian, belanja pegawai pemerintah mencapai 528,63 milyar rupiah pada tahun 2016. Pertumbuhan belanja pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 22,81 persen. Perkembangan belanja pegawai yang secara umum menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang semakin beragam dan meningkat kuantitasnya. Selain itu, hal ini berkaitan erat juga dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme dan produktivitas aparatur negara.



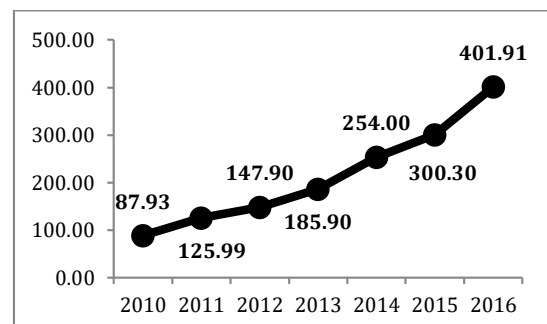
Sumber: DJPK, diolah

Gambar 2 Perkembangan Belanja Pegawai di Kota Serang Tahun 2010-2016 (milyar rupiah)

Peningkatan belanja pegawai yang tidak terkendali dapat berpotensi menyebabkan kenaikan tingkat harga. perkembangan belanja pegawai terlihat searah dengan perkembangan inflasi pada

tahun 2012-2014 dimana keduanya menunjukkan trend naik. Pada tahun 2011 dan 2015, perkembangan belanja pegawai berlawanan dengan perkembangan inflasi dimana belanja pegawai mengalami kenaikan namun inflasi mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2016 perkembangan belanja pegawai dan inflasi sama-sama menunjukkan kenaikan.

Seperti halnya belanja pegawai, gambar 3 menunjukkan bahwa belanja barang pemerintah Kota Serang juga mengalami peningkatan tiap tahunnya pada periode 2010-2016. Pada tahun 2010, belanja pegawai mencapai 87,93 milyar rupiah. Kemudian, belanja pegawai mencapai 401,91 milyar pada tahun 2016. Pertumbuhan belanja barang terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 43,28 persen. Peningkatan belanja barang ini merupakan upaya mendukung berbagai kegiatan operasional pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat terus-menerus. Peningkatan belanja pemerintah selain belanja gaji pegawai yang pesat terutama setelah krisis ekonomi sejalan dengan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis melalui kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif.

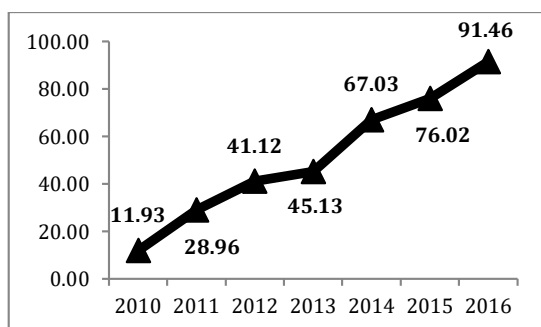


Sumber: DJPK, diolah

Gambar 3 Perkembangan Belanja Barang di Kota Serang Tahun 2010-2016 (milyar rupiah)

Pada tahun 2011, perkembangan belanja barang berlawanan dengan perkembangan inflasi dimana belanja pegawai mengalami kenaikan namun inflasi mengalami penurunan. Perkembangan belanja barang mulai terlihat searah dengan perkembangan inflasi pada tahun 2012-2014 dimana keduanya menunjukkan trend naik. Namun, perkembangan belanja barang dan inflasi kembali tidak searah mulai tahun 2015. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa peningkatan belanja barang yang tidak terkendali akan berpotensi terjadinya inflasi.

Total penerimaan pajak daerah di Kota Serang juga cenderung mengalami kenaikan pada periode 2010-2016. Pada tahun 2010, penerimaan pajak daerah mencapai 11,93 milyar rupiah. Kemudian, penerimaan pajak daerah mencapai 91,46 milyar pada tahun 2016. Kenaikan pajak secara terus-menerus pada periode tersebut merupakan salah satu dampak positif dari implementasi reformasi pajak pada tahun 1995. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011, yakni mencapai 142,72 persen.



Sumber: DJPK, diolah
 Gambar 4 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang Tahun 2010-2016 (milyar rupiah)

Sama halnya dengan pola perkembangan belanja pegawai, perkembangan penerimaan pajak daerah berlawanan dengan perkembangan inflasi dimana penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan namun inflasi mengalami penurunan pada tahun 2011. Perkembangan penerimaan pajak daerah mulai terlihat searah dengan perkembangan inflasi pada tahun 2012-2014 dimana keduanya menunjukkan trend naik. Namun, perkembangan belanja pegawai penerimaan pajak daerah dan inflasi kembali tidak searah mulai tahun 2015.

Pembentukan Model Terbaik dan Pengujian Asumsi Dasar

Dengan menggunakan *software Eviews 6*, model terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$INF_t = -2,09 + 0,36 \ln BP_t^* + 0,34 \ln BB_t^* - 0,19 \ln PP_t^* + e_t$$

$$Adjusted R^2 = 0,9925$$

$$Prob F - Stat = 0,000392$$

Keterangan:

* signifikan pada *alpha* 5 persen

Tabel 1
 Hasil Pengujian Signifikansi Seluruh Variabel Bebas Model Terbaik

Variabel	<i>t-statistic</i>	<i>P-value</i>
$\ln BP_t$	4,1416	0,0256
$\ln BB_t$	10,2048	0,0020
$\ln PP_t$	-5,1034	0,0146

Gujarati (2004) mengatakan bahwa semua statistik parametrik termasuk regresi linier berganda mensyaratkan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum estimasi model dilakukan. Pelanggaran terhadap satu atau beberapa asumsi saja mungkin akan menyebabkan

masalah yang serius seperti koefisien regresi menjadi bias, standar error menjadi bias dan nilai R^2 serta pengujian signifikansi menjadi tidak tepat/*misleading*. Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi tersebut.

Model yang mampu menghasilkan penduga yang *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*) harus memenuhi asumsi kenormalan, homoskedastisitas, non-autokorelasi, dan non-multikolinieritas. Berikut ini ringkasan hasil pengujian normalitas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi dengan menggunakan *software Eviews 6*.

Tabel 2
 Hasil Pengujian Beberapa Asumsi Dasar pada Model Terbaik

Pengujian	<i>P-value</i>
<i>Jarque-Bera</i>	0,6157
<i>Breusch-Pagan-Godfrey</i>	0,5509
<i>Lagrange Multiplier</i>	0,2966

Asumsi Normalitas dari model yang terbentuk telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas (*P-value*) dari *Jarque-Bera test* lebih besar dari *alpha* 0,05 (terima H_0). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa residual dari model yang terbentuk berdistribusi normal.

Varians residual dari model yang terbentuk juga bersifat homoskedastis. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*P-value*) dari *Breusch-Pagan-Godfrey test* lebih besar dari *alpha* 0,05 (terima H_0).

Pada model yang terbentuk diatas, tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*P-value*) dari *Lagrange Multiplier test* (*LM test*) lebih besar dari *alpha* 0,05 (terima

H_0). Dengan kata lain, asumsi non-autokorelasi terpenuhi.

Pengujian asumsi non-multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan uji formal yakni berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*). Dengan menggunakan *software SPSS 22*, diperoleh hasil pengujian non-multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 3
 Hasil Pengujian Non-Multikolinieritas pada Variabel Bebas Model Terbaik

Variabel	<i>VIF</i>
$\ln BP_t$	1,808
$\ln BB_t$	1,282
$\ln PP_t$	2,689

Asumsi Non-Multikolinieritas atas seluruh variabel bebas yang digunakan dalam model sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) untuk seluruh variabel jauh lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi hubungan antara variabel bebas yang masuk ke dalam model.

Berdasarkan uji asumsi dasar di atas, dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk merupakan model terbaik. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah terhadap inflasi di Kota Serang.

Efektivitas Kebijakan Fiskal Daerah dalam Pengendalian Inflasi di Kota Serang

Nilai *Adjusted R-Square* yang diperoleh sebesar 0,9925 yang berarti bahwa variasi yang terjadi pada inflasi dapat dijelaskan oleh pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, dan

penerimaan pajak daerah sebesar 99,25 persen sedangkan sisanya sebesar 0,75 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model.

Secara overall, pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh terhadap inflasi di Kota Serang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji *F-statistic* sebesar 0,000392 yang lebih kecil dari alpha 0,05.

Secara parsial, variabel pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah signifikan di dalam model. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *p-value* uji *t-statistic* untuk kedua variabel bebas tersebut lebih kecil dari alpha 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh terhadap inflasi di Kota Serang.

Secara umum, pengaruh kebijakan fiskal terhadap inflasi dapat diterangkan melalui analisis Keynesian dengan model permintaan agregat-penawaran agregat (model AD-AS). Model ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek, ketika kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Model ini dapat menjelaskan bagaimana variabel fiskal mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat dalam negeri secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak maupun melalui kenaikan permintaan konsumsi masyarakat. Model AD-AS ini serupa dengan model permintaan dan penawaran dalam analisis ekonomi mikro yaitu permintaan dan penawaran merupakan fungsi harga

Nilai koefisien pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0,36 memiliki arti bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, jika pertumbuhan belanja pegawai naik sebesar 1 persen maka inflasi di Kota Serang akan naik sebesar 0,36 persen. Pengaruh positif pertumbuhan belanja pegawai terhadap inflasi sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Sejalan dengan teori Keynesian mengenai inflasi, kenaikan belanja pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai setiap tahunnya ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat saat terjadi inflasi. Namun, disisi lain kenaikan belanja gaji ini malah berpotensi meningkatkan inflasi. Kenaikan gaji pegawai akan menyebabkan lonjakan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa misalnya barang kebutuhan pokok. Jika permintaan terhadap barang dan jasa ini melebihi produksinya maka akan terjadi kekurangan penawaran yang dapat memicu terjadinya kenaikan harga barang dan jasa tersebut.

Nilai koefisien pertumbuhan belanja barang sebesar 0,34 memiliki arti dengan tingkat kepercayaan 95 persen, jika pertumbuhan belanja barang naik 1 persen maka inflasi di Kota Serang naik 0,34 persen. Pengaruh positif pertumbuhan belanja barang terhadap inflasi sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Seperti halnya belanja gaji pegawai, belanja barang Pemerintah ini pun mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan semakin kompleksnya tugas-tugas pemerintahan. Kenaikan belanja barang ini dapat pula menyebabkan lonjakan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Permintaan terhadap barang dan jasa yang melebihi penawarannya ini berpotensi mengakibatkan kenaikan

tingkat harga berbagai barang dan jasa tersebut.

Nilai koefisien pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebesar -0,19 memiliki arti bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, jika pertumbuhan penerimaan pajak daerah naik sebesar 1 persen maka inflasi di Kota Serang turun sebesar sebesar 0,19 persen. Pengaruh negatif pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap inflasi sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi pendapatan disposibel (*disposable income*) masyarakat sehingga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa. Akhirnya, harga-harga barang dan jasa di Kota Serang mengalami penurunan.

Pengaruh yang signifikan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah terhadap inflasi di Kota Serang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan fiskal dinilai efektif dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terlihat bahwa belanja pegawai yang memiliki pengaruh paling besar terhadap inflasi di Kota Serang. Sebaliknya, penerimaan pajak daerah kurang begitu berperan dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Namun demikian, perlu diketahui pula bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang kurang hati-hati (*prudent*) dan mengabaikan perannya sebagai stabilisator otomatis berpotensi menyebabkan inflasi.

Hasil penelitian ini pun membuktikan keberlakuan model keynessian pada tingkat regional, khususnya di Kota Serang. Pengaruh yang signifikan dan positif belanja pegawai dan belanja barang

terhadap inflasi serupa dengan hasil penelitian dari Masri (2010) dan Pratama (2013). Pengaruh positif ini terjadi karena peningkatan permintaan barang dan jasa di Kota Serang tidak dapat diantisipasi oleh sisi penawaran. Dengan kata lain, telah terjadi inflasi akibat meningkatnya sisi permintaan (*demand pull inflation*). Sebaliknya, pengaruh yang signifikan dan negatif penerimaan pajak daerah terhadap inflasi berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013). Hal ini berarti upaya menaikkan tarif pajak pada dasarnya dapat dijadikan upaya menurunkan tingkat inflasi namun apabila kenaikan pajak terlalu tinggi dapat pula berdampak pada kenaikan biaya produksi sehingga mengakibatkan kenaikan harga jual barang dan jasa. Kenaikan harga jual barang dan jasa akibat kenaikan unsur biaya produksi disebut dengan inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*).

KESIMPULAN

Belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah di Kota Serang secara umum terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya selama tahun 2010 hingga 2016. Pertumbuhan belanja pegawai dan belanja barang pemerintah yang pesat setelah krisis ekonomi tidak lepas dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah krisis ekonomi. Penerimaan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan menunjukkan efektivitas implementasi reformasi pajak.

Pengendalian terhadap belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah dinilai efektif dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Namun demikian, implementasi kebijakan fiskal melalui ketiga instrumen fiskal ini

tetap dilakukan dengan lebih hati-hati (*prudent*) karena implementasi kebijakan fiskal yang kurang hati-hati dapat meningkatkan inflasi.

Belanja pemerintah, dalam hal ini belanja pegawai dan belanja barang secara signifikan berpengaruh positif terhadap inflasi di Kota Serang. Hal ini mengindikasikan terjadinya inflasi akibat meningkatnya sisi permintaan yang tidak dapat diantisipasi oleh sisi penawaran (*demand pull inflation*). Dengan demikian, pemerintah perlu mendorong sektor-sektor produktif agar mampu meningkatkan outputnya sehingga mampu memenuhi permintaan agregat dan menghindari kelangkaan persediaan barang dan jasa yang dapat memicu inflasi.

Menaikkan tarif pajak pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi inflasi. Namun, apabila kenaikan tarif pajak ini terlalu besar dapat pula berdampak pada kenaikan biaya produksi sehingga memicu kenaikan harga jual barang dan jasa (*cost push inflation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Akitoby, B. et al. (2004). The Cyclical and Long-term Behavior of Government Expenditures in Developing Countries, *IMF Working Paper*, WP/04/02.
- Baldacci, et.al. (2009). Neither Sailing Against the Wind, Nor Going with the Flow: Cyclicity of Fiscal Policy in Indonesia, *IMF Country Report* No. 09/231.
- Boediono. (1995). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics: Forth Edition*. Mc. Graw Hill Companies.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi terjemahan*. Surabaya: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. (2006) *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Makro (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Margaretha, Ohyver. (2014). *Penerapan Metode Transformasi Logaritma Natural dan Partial Least Square untuk Memperoleh Model Bebas Multikolinier dan Outlier*. Jakarta: Binus University.
- Masri, Marius. (2010). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001-2008) [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nanga Muana. (2001). *Makroekonomi, Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Prasad.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter jilid I dan II*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Pratama, Jaka. (2013). *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Penerimaan Pajak terhadap Inflasi di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Vector Auto Regression (VAR) Periode 1970-2011* [Skripsi]. Jakarta: STIS.
- Saputra, Kurniawan. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Inflasi di Indonesia 2007-2012* [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Surjaningsih, Ndari. G.A Diah Utari, Budi Trisnanto. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output

dan Inflasi. *Buletin Ekonomi
Moneter dan Perbankan* Edisi
April 2012.